

DAFTAR PUSTAKA

A. Sekunder:

- Asshiddqi Jimly, 2007, Kata Sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tanggal 23 Oktober 2007, dalam *Kitab Advokat Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Alumni, Jakarta;
- Ilyas Amir, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deeppublish, Yogyakarta;
- Lawrence M Friedman, kutipan dari buku Amir Ilyas, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deeppublish, Yogyakarta;
- Alkostar Artidjo, 2010, *Peran Advokat Era Globalisasi*, Yogyakarta, FH . UII Press;
- Supriadi, 2008, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Nasution Adnan Buyung, 2007, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme Advokat*, Penerbit KATA, Jakarta;
- Kelsen Hans, 2011, *General theory of law and state*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung;
- Aristoteles, dikutip dari buku, Raja Onggal Siahaan, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Penerbit, Rao Pres, Jakarta;
- Hadjon M Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Penerbit: Bina Ilmu, Surabaya;
- Miru Ahmadi, 2015, *Prinsip Perlindungan Hukum Konsumen*, Rajawali Pers Jakarta;
- Syahrani Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung;
- Hans Kelsen, 2008, dikutip dari buku, Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta;
- Rato Dosminikus, 2010, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT. Presindo, Yogyakarta;
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Di Indonesia, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta;
- Marzuki Mahmud Peter, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta;

Sandra Coliver, 2007, *Pedoman Article 19, Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat*, Erlangga, Jakarta;

Birkmayer dan Binding Karl dalam buku Chazawi Adam, 2002, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan dan Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo Persada;

Adam Chazawi, 2002, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan dan Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo Persada;

Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama;

Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang;

Saifullah. 2004, *Buku Ajar Konsep Dasar Hukum Pidana*, UIN Malang;

Siahaan Onggal Raja, *Filsafat Hukum*, 2009, Penerbit Rao Press, Cetakan Pertama, Jakarta;

Hobbes Thomas, dikutip dari buku Siahaan Onggal Raja, 2009, *Filsafat Hukum*, Penerbit Rao Press, Jakarta;

Sibuea P. Hotma, 2017, *Ilmu Politik Hukum sebagai suatu cabang Ilmu Pengetahuan*, Penerbit Erlangga, Jakarta;

Ali Zinuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta;

Bryan Magee, 2001, *The Story Of Philosophy*, terjemahan Marcus Widodo dan Hardono Hadi, Yogyakarta: Kanisius;

Lev S Daniel, 2001, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia*, Jakarta;

Sukris Sarmadi, 2009, *Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini*, CV. Mandar Maju, Bandung;

Pangaribuan M. Luhut, 2010, *Advokat dan Contempt of Court*, Sinar Grafika, Jakarta;

Tono dan Bhektin Suryani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Jakarta;

Pandu Yudha, 2001, *Klien dan Penasehat Hukum dalam Persepektif Masa Kini*, PT. Abadi Jaya, Jakarta;

- Andi Sofyan, 2006, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Deepublish, Yogyakarta;
- Sunggono Bambang dan Harianto Aries, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung;
- Pramudy Kelik dan Widiatmoko Ananto, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta;
- Asshiddiqie Jimly, 2005, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, 2005, Jakarta;
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 2015, Cetakan 47, PT. Grafindo Persana, Jakarta;
- Manan Bagir, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, Asosiasi Advokat Indonesia*, Jakarta;
-2006, Kedudukan Penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Varia Peradilan ke XXI Nomor 243 Februari 2006;
- Widhayanti Erni, 1988, *Hak-hak Tersangka/ Terdakwa di dalam KUHAP*, Liberty Yogyakarta;
- Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Malang;
- Hatta Moh. 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta;
- Soemarno P. Wirjanto, 1986, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Prodjohamidjojo Martiman, 1989, *Penasihat dan Bantuan Hukum di Indonesia Latar Belakang dan Sejarahnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Siahaan Onggal Raja, *Filsafat Hukum*, 2009, Penerbit, Rao Pres, Jakarta;
- Hasibuan Otto, Pidato Pengukuhan Gelar Profesor Kehormatan Otto Hasibuan di Universitas Jayabaya, Jakarta, Selasa 14 Oktober 2014. Pidato bertajuk *Mewujudkan Cita-Cita Advokat Demi Tercapainya Rule Of Law*;
- Atsasmita Romli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta;
- Mertokusumo Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Liberti, Yogyakarta;

- Kusumaatmadja Muchtar, 2000, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Buku I*, Alumni, Bandung;
- Nusantara Garuda Hakim Abdul, 1998, *Politik Hukum Indonesia*, YLBHI, Jakarta;
- Reksodiputro Mardjono, 2009, *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum*, KHN, Jakarta;
- Rusdi Muhammad, 2013, *Lembaga Pengadilan di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta;
- Santoso Topo, 2000, *Polisi, Jaksa, Advokat, Hakim dan Problem Penegakan Hukum di Indonesia dalam Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, penerbit, Pusat Studi Peradilan Pidana, Jakarta;
- Sinaga Harlen V, 2011, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta;
- Widodo Fajar Sidiq Muhammad dkk, JIPPK, Volume 3, Nomor 2, ISSN: 2528-0767 (p) dan 2527-8495, *Kedudukan Organisasi Advokat Sebagai Wadah Tunggal*;
- Samudera Teguh, 2006, *Makalah Seminar Nasional & Dialog Immunitas & hak-hak Advokat Berdasarkan Undang-Undang Advokat*, Surabaya;
- Hadjon M. Phillipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya;
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta;
- Remelink Jan, 2014, dikutip dari buku Eddy OS Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka;
- Mualimin Abdi, *Pandangan pemerintah yang disampaikan Direktur Litigasi sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Advokat di ruang sidang Mahkamah Konstitusi Kamis, 18 April 2013.*
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt516fd7d79a119/pemerintah-nilai-uu-sudah-lindungi-advokat>. Diupload pada tanggal 18 April 2019, Pukul 17.17. PM;
- Mahendra Ihza Yusril, *Saksi ahli di Pengadilan Mahkamah Konstitusi dalam permohonan judicial review Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003, terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945, dengan perkara nomor 35/PUU-XVI/2018, tanggal 18 Desember 2018;*

Saldi Isra, Saksi ahli di Pengadilan Mahkamah Konstitusi dalam permohonan judicial review Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003, terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945 dengan Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010, 71/PUU-VIII/2010 dan 79/PUU-VIII/2010;

Lubis Mulya Todung, Saksi ahli di Pengadilan Mahkamah Konstitusi dalam permohonan judicial review Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003, terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945 dengan Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010, 71/PUU-VIII/2010 dan 79/PUU-VIII/2010;

Nusantara Garuda Hakim Abdul, Saksi ahli di Pengadilan Mahkamah Konstitusi dalam permohonan judicial review Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003, terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945 dengan Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010, 71/PUU-VIII/2010 dan 79/PUU-VIII/2010;

Sahetapy JE, Saksi ahli di Pengadilan Mahkamah Konstitusi dalam permohonan judicial review Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003, terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945 dengan Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010, 71/PUU-VIII/2010 dan 79/PUU-VIII/2010;

Mahendra Yusril Ihza, Saksi ahli di Pengadilan Mahkamah Konstitusi dalam permohonan judicial review Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003, terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945 dengan Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010, 71/PUU-VIII/2010 dan 79/PUU-VIII/2010;

HAS, Natabaya, Saksi ahli di Pengadilan Mahkamah Konstitusi dalam permohonan judicial review Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003, terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945 dengan Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010, 71/PUU-VIII/2010 dan 79/PUU-VIII/2010;

Nasution Buyung Adnan, Saksi ahli di Pengadilan Mahkamah Konstitusi dalam permohonan judicial review Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003, terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945 dengan Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010, 71/PUU-VIII/2010 dan 79/PUU-VIII/2010;

Sirait Maruarar, Saksi ahli di Pengadilan Mahkamah Konstitusi dalam permohonan judicial review Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003, terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945 dengan Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010, 71/PUU-VIII/2010 dan 79/PUU-VIII/2010;

Harjon M Philipus, Saksi ahli di Pengadilan Mahkamah Konstitusi dalam permohonan judicial review Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003, terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945 dengan Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010, 71/PUU-VIII/2010 dan 79/PUU-VIII/2010;

Girsang, Juniver, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt560aab4997bc7/tiga-kubu-peradi-tanggapi-terbitnya-surat-ketua-ma>. Diupload pada tanggal 30 April 2019, Pukul 20.31. PM;

Tampubolon, Tomas, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt560aab4997bc7/tiga-kubu-peradi-tanggapi-terbitnya-surat-ketua-ma>. Diupload tanggal 30 April 2019, Pukul 20.31. PM;

Pangaribuan, MLuhut, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt560aab4997bc7/tiga-kubu-peradi-tanggapi-terbitnya-surat-ketua-ma>. Diupload pada tanggal 30 April 2019, Pukul 20.31. PM.

B. Jurnal

Solehuddin, *Menakar Hak Imunitas Profesi Advokat*, *RechtIdee*, Jurnal Hukum, Volume 10, No. 1, Juni 2015;

Pradjonggo Sridjaya Tjandra, *Dampak Terbitnya Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015*, Jurnal Hukum, Nomor 1 periode Mei 2016;

C. Primer

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Kitab Advokat Indonesia;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang -Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/44/III/2002, perihal pembentukan panitia bersama ujian pengacara praktek tahun 2002.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/445/VI/2003 perihal wadah tunggal organisasi Advokat;

Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/HK.01/III/2010 perihal Ketua Pengadilan Tinggi diminta untuk sementara tidak mengambil sumpah para calon Advokat;

Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010, perihal Penyempahan Advokat, tanggal 25 Juni 2010;

Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 073/KMA/VI/2015 perihal bahwa PERADI yang dianggap sebagai wadah tunggal sudah terpecah dengan masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah;

Peraturan Peradi Nomor 3 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat diatur bahwa Peradi dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan PKPA;

Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 35/PUU-XVI/2018, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, tanggal 18 Desember 2019.<https://nasional.kontan.co.id/news/mahkamah-konstitusi-mk-----kembalimenggelar-sidang-uji-materi-uu-tentang-advokat>. Dipload pada tanggal 19 Maret 2019, Pukul, 21.00. PM;

Putusan Mahkamah Kontitisi Pengujian Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Nomor 006/PUU-II/2004, tanggal 24 Desember 2004;

Putusan Mahkamah Kontitisi, Pengujian Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Nomor 014/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006;

Putusan Mahkamah Kontitisi, Pengujian Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Nomor 101/PUU-VII/2009, tanggal 30 Desember 2009;

Putusan Mahkamah Kontitusi, Pengujian Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Nomor 66/PUU-VIII/2010, tanggal 27 Juni 2011;

Putusan Mahkamah Kontitusi, Pengujian Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Nomor 71/PUU-VIII/2010, tanggal 27 Juni 2011;

Putusan Mahkamah Kontitusi, Pengujian Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Nomor 79/PUU-VIII/2010, tanggal 27 Juni 2011;

Putusan Mahkamah Kontitusi, Pengujian Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Nomor 103/PUU-XI/2013;

Putusan Mahkamah Kontitusi, Pengujian Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Nomor 112/PUU-XII/2014;

Putusan Mahkamah Kontitusi, Pengujian Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Nomor 036/PUU-XIII/2015;

Putusan Mahkamah Kontituti, Pengujian Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Nomor 35/PUU-VIII/2010.

D. Tersier

Web (Website)

<https://kbbi.web.id/>

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta;

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20541/node/653/putusanmahkama-hkonstitusi-perkara-nomor-006puuiv2004-tahun-2004>. Diupload pada tanggal 19 Maret 2019, Pukul 21.10.PM;

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25888/node/653/putusan-mk-no-----014_puu-iv_2006-pengujian-undang-undang-advokat-nomor-18-tahun-2003-tentang-advokat. Diupload pada tanggal 19 Maret 2019, Pukul 21.19. PM;

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50cad7a396a5f/node/lt5178b252f399c/putusan-mk-no-071_puu-x_2012-pengujian-undang-undan-nomor-8-tahun-1981-tentang-hukum-acara-pidana. Diupload-pada tanggal 10 Maret 2019, Pukul 21.21.PM;

[https://www.scribd.com/document/61730560/Putusan-Sidang- MK- Nomor-66-PUU-VII-2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 28 ayat \(1\) dan Pasal 32 ayat \(3\), \(4\) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IV/2006](https://www.scribd.com/document/61730560/Putusan-Sidang- MK- Nomor-66-PUU-VII-2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (3), (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IV/2006). Diupload pada tanggal 27 April 2019, Pukul 21.03. PM;

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt543f8d8ea01bc/advokat-haru belajar dari-cicero-dan-julius-caesar>. Diupload pada tanggal 19 Maret 2019, Pukul 21.00. PM;

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/advokat-harusbelajar dari cicero-dan-julius-caesar>. Diupload pada tanggal 19 Maret 2019, Pukul 21.00. PM;

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b4d9c536c3c0/node/653/putusan-mk-no-101_puu-vii_2009-pengujian-undang-undang-nomor-18-tahun-2003-tentang-advokat. Diupload pada tanggal 18 April 2019, Pukul 23.33. PM;

file:///D:/Documents/Downloads/Nomor%2036_PUU-XIII_2015.pdf. Diupload tanggal 19 Maret 2019, Pukul 21.37. PM;

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c0f3d700a3fc/node/653/fatwa-mahkamah no052_kma_v_2009-tahun-2009-sikap-mahkamah-agung-terhadap organisasi-advokat. Diupload pada tanggal 18 April 2019, Pukul 23.33. PM;

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5609849a4e604/-lengkap--kebijakan-terbaru terkait penyempahan-advokat>. Diupload pada tanggal 18 April 2019, Pukul 24.07. PM;

http://userfiles.hukumonline.com/redaksi/Surat_KMA_perihal_Penyempahan_Advokat.pdf.suratkeputusanMahkamahAgungNomor73/KMA/HK.01/IX/2015, diupload pada tanggal 18 April 2019, Pukul 00.00. PM;

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5121a23d0608b/node/653/surat-ma-no---089_kma_vi_2010-tahun-2010-penyempahan-advokat. Diupload pada tanggal 18 April 2019, Pukul 23.53. PM;

http://userfiles.hukumonline.com/redaksi/Surat_KMA_perihal_Penyempahan_Advokat.pdf. Diupload pada tanggal 22 April 2019, Pukul 22.02. PM;

<https://nasional.kontan.co.id/news/mahkamah-konstitusi-kembali-menggelar--uji-materi-uu-tentang-advokat><Acara Persidangan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 35/PUU-XVI/2018,tanggal 18 Desember 2018, Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Diupload tanggal 18 April 2019, Pukul 18.08. PM;

<https://hukum.com/pengertian-perindungan-hukum-menurut-pendapatpara-ahli>.Diupload pada tanggal 01 Mei 2019, Pukul 19.09.PM;

<https://www.inews.id/news/nasional/lucas-divonis-7-tahun-kpk-hormati-putusan-----pengadilan-tipikor/492613>. Diupload pada tanggal 01 Mei 2019, Pukul. 19.19. PM;

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a9382d75820d/tiga-kubu-peradi-bersatu-menjaga-marwah-profesi-advokat>. Diupload pada tanggal 01 Mei 2019, pada Pukul 19.39. PM;

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/akhirnyaadvokat-dapat-perindungan-di-luar-sidang>. Diupload pada tanggal 01 Mei 2019, Pukul 19.49. PM;

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c936c20a6d96/ma-perberat-vonis-fredrich-yunadi-jadi-7-5-tahun-bui>. Diupload pada tanggal 1 Mei 2019, Pukul 19.59. PM;

<https://www.google.com/search?safestrict&ei>. Diupload pada tanggal 1 Mei 2019, pukul 20.09. PM;

<http://userfiles.hukumonline.com/redaksi/SuratKMAperihal-Penyumpahan-Advokat.pdf> Diupload pada tanggal 01 Mei 2019, pukul 20.19. PM.

